

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGAWASAN INTERNAL DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rosyidah¹, Indra Laila Kusuma², Yuwita Ariessa Pravasanti³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

Email: 05rosyidah@gmail.com¹, yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai latar belakang pengaruh akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kabupaten Boyolali. Penulis menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali. Penulis merangkap jumlah Populasi sebanyak 63 pegawai di Intansi Pemerintahan Boyolali. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali dengan jumlah 60 pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (Angket). Hasil dari penelitian ini penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik (X1) tidak berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Pengawasan internal secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah Boyolali, sehingga dapat disimpulkan Pengawasan Internal (X2) berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Kualitas laporan keuangan (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Description of the background of the influence of public sector accounting, internal supervision, and the quality of financial reports on the performance accountability of government agencies BKAD Boyolali Regency. The author uses a quantitative method which is a research method based on the philosophy of positivism, used to research on certain populations or samples, data collection using research instruments, data analysis is quantitative or statistical, The population in this study is

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Government Employees at the Regional Financial Agency Performance of Government Agencies Boyolali. The author also has a population of 63 employees in the Boyolali Government Agencies. Purposive sampling is a sampling technique with certain considerations. The sample in this study is Government Employees at the Regional Financial Agency Performance of Government Agencies Boyolali with a total of 60 employees. The data collection technique used in this study is a Questionnaire (Questionnaire). The results of this study the application of public sector accounting does not have a significant effect on the performance accountability of government agencies, so it can be concluded that Public Sector Accounting (X1) does not have a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies (Y). Internal supervision significantly influences the accountability of Boyolali government agencies, so it can be concluded that Internal Supervision (X2) has a significant influence on the Performance Accountability of Government Agencies (Y). The quality of financial reports (X3) has a significant influence on the performance accountability of government agencies (Y).

Keywords: *Public Sector Accounting, Internal Control, Financial Reporting Quality*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja adalah sarana untuk mengungkapkan pencapaian atau kegagalan suatu lembaga pemerintah dalam memenuhi tuntutan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Akuntabilitas kinerja dapat terwujud dengan mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati & Heliana, 2022). Peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah juga berpenerapan besar terhadap sektor ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan daerah harus dikelola secara tepat, transparan, ekonomis dan efisien. Laporan keuangan tersebut menjadi referensi informasi untuk menetapkan dan menyetujui kebijakan pembangunan dan pertumbuhan wilayah (Fildzah, 2021).

Tren yang menarik di sektor publik Indonesia adalah meningkatnya fokus pemerintah pusat dan daerah pada akuntabilitas publik. Mendorong keterbukaan dan menghasilkan akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan informasi mengenai operasi keuangan dan keadaan pemerintah daerah. Tugas akuntan di sektor publik termasuk menawarkan layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Aksesibilitas pelayanan publik dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kesejahteraan setiap orang dapat terpenerapan jika masyarakat tidak terlayani dengan baik. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sangat penting (Hikmawati, 2022).

Menurut Nurgaeni & Budiantara (2019) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pengawasan internal memegang peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, bersih, dan bebas dari kegiatan korupsi. Pengawasan internal juga turut mendorong tercapainya cita-cita pemerintahan yang baik. Pengawasan internal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan kesadaran kepada warga negara bahwa hak-hak mereka ditegakkan sebagai pemangku kepentingan. Pengendalian internal suatu lembaga pemerintah juga dapat menentukan apakah lembaga tersebut telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan undang-undang yang relevan. Penerapan pengendalian intern yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah (Fildzah, 2021).

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merujuk pada standar yang harus terpenuhi dalam penyampaian informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan, laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 harus memenuhi empat karakteristik utama yaitu, relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan dan kemampuan untuk dipahami. Keadaan ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan laporan keuangan yang baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketersediaan laporan keuangan ini menjadikannya sebagai sumber data yang digunakan untuk memilih dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat mempetbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini, 2012).

Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah telah banyak sebelumnya diteliti oleh para ahli. Seperti penelitian Ramdhanu (2019) pengaruh penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi pada BAPENDA Provinsi NTB secara parsial variabel pengawasan laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Begitu juga dengan penelitian (Pamungkas, 2019) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja, maka antara lain diperlukan akuntabilitas keuangan yang dapat mengukur dan menilai upaya capaian hasil.

Berdasarkan opini ((BPK), 1995) Laporan Keuangan Pemerintah Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali (LKPD) untuk periode yang telah berakhir pada 31 Desember 2024 yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatatn atas laporan keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah

ISSN: 3025-9495

Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Dapat disimpulkan bahwan Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

TINJAUAN TEORITIS

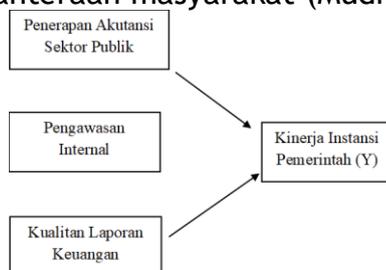
Menurut Wiratna (2019) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Menurut Rahmat Murwanto, dkk (2005: 153) Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki peraturan resmi tentang sistem pengendalian intem baku yang berlaku secara nasional. Peraturan setingkat Peraturan Pemerintah sedang disusun. Untuk memahami konsep pengendalian intern, kita perlu mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Dalam kerangka ini, tujuan pengendalian intern adalah efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian intern juga memiliki tujuan tambahan berkenaan dengan pengelolaan aset.

Menurut (Nasution & Br. Barus, 2019), laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang disajikan mempunyai relevan dengan kebutuhan penggunanya. Dengan kata lain, laporan keuangan dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, membuat prediksi dan menerapani keputusan

penggunanya. Informasi dianggap relevan jika memenuhi kriteria yaitu manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*) dan lengkap. Agar informasi dianggap relevan misalnya laporan keuangan harus tersedia tepat waktu misal dalam waktu dua bulan setelah akhir tahun keuangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mudrikah, 2020).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

ISSN: 3025-9495

1. H1 : Penerapan akuntansi sektor publik (X1) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) Kabupaten Boyolali.
2. H2 : Pengawasan internal (X2) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) Kabupaten Boyolali.
3. H3: Kualitas laporan keuangan (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) Kabupaten Boyolali.
4. Y : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam kontesk model regresi, variabel terikat bebas memiliki distribusi yang normal. Dalam pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, digunakan pendekatan yang valid dan efektif terutama pada sampeal yang berjumlah kecil. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal
- 2) Jika signifikan $> 0,05$, maka dapat dianggap bahwa data memiliki ditribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas BKAD Boyolali:

Tabel 1 Uji Normalitas

Standar Normalitas	Asymp Sig	Keterangan
0,05	0,2	Terdistribusi Normal

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Data dapat disimpulkan terdistribusi normal karena asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,200 $> 0,05$ diketahui dari tabel diatas.

a. Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas menentukan apakah model regresi dengan benar mengidentifikasi korelasi antara variabel independen, uji multikolinearitas digunakan. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Pengamatan variabel nilai toleransi atau faktor inflasi (VIF) digunakan untuk menentukan apakah ada gejala multikolinearitas:

- 1) Jika nilai VIF < 10 atau nilai toleransi $> 0,10$, maka hal ini menunjukkan ketiadaan multikolineritas
- 2) Jika nilai VIF > 10 atau nilai toleransi $< 0,10$, maka nilai ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.

Hasil uji multikoloniaritas tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Uji Multikoloniaritas

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntansi			Tidak ada
Sektor Publik	0,515	1,941	Multikoloniaritas
Pengawasan			Tidak ada
Internal	0,510	1,962	Multikoloniaritas
Kualitas			Tidak ada
Laporan Keuangan	0,667	1,498	Multikoloniaritas

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa multikolinieritas tidak terjadi karena variabel Akuntansi Sektor Publik mendapat nilai tolerance $0,515 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,941 > 10$. Untuk mencegah terjadinya multikolinieritas maka variabel pengendalian intern diberi nilai tolerance $0,510 > 0,10$ dan nilai VIF $1,96 > 10$. Untuk memastikan tidak adanya tanda-tanda multikolinieritas maka variabel kualitas laporan keuangan diberi nilai tolerance $0,667 > 0,10$ dan nilai VIF $1,498 > 10$.

1. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas:

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Akuntansi sektor publik	0,354	0,725	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PI	0,764	0,449	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Laporan Keuangan	1,651	0,107	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikan variabel akuntansi sektor publik sebesar $0,725$, Pengawasan Internal sebesar $0,449$, dan Kualitas Laporan Keuangan $0,107$ hasil tersebut lebih besar $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh akuntansi sektor publik (X_1), PI (X_2), dan Kualitas Laporan Keuangan (X_3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) digunakan regresi linier berganda. Berikut persamaan regresi linier berganda:

Tabel 4 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	12,171	6,040
Akuntansi sektor publik	-0,156	0,252
Pengawasan Internal	0,581	0,189
Kualitas Laporan Keuangan	0,212	0,101

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,171 - 0,156 + 0,581 + 0,212 + e$$

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b0 = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi berganda

X1 = akuntansi sektor publik

X2 = PI

X3 = Kualitas Laporan Keuangan

e = Standar error

PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kinerja Instansi Pemerintah Boyolali, karena hasil t hitung akuntansi sektor publik sebesar $-0,617 < 2,026$ dan nilai signifikan $0,541 > 0,05$. Terdapat beberapa kemungkinan alasan mengapa penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan seperti penerapan akuntansi sektor publik yang kurang optimal, faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kualitas kepemimpinan, sistem pengawasan internal, kualitas laporan keuangan serta adanya keterbatasan sistem akuntansi yang belum dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam meningkatkan

2. Pengaruh Pengawasan Internal pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan temuan percobaan, penggunaan Pengawasan internal secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah BKAD di Kinerja Instansi Pemerintah Boyolali, karena hasil t hitung akuntansi sektor publik sebesar $3,069 > 2,026$ t tabel dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Pengawasan Internal (X2) berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tadjudinsyah (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian yang dilakukan Salamah (2020) juga menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena pengawasan internal membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. BKAD Kinerja Instansi Pemerintah Boyolali memiliki pengawasan internal yang baik, hal

tersebut diketahui bahwa responden cenderung menilai bahwa tempat mereka bekerja memiliki pengawasan internal yang baik terutama pada tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan pengawasa internal yang baik. Artinya bahwa semakin baik pengawasan internal maka cenderung meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan, terbukti bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ditunjukkan dengan nilai signifikasi variabel kualitas laporan keuangan (X3) $0,044 < 0,05$ dan nilai thitung $2,090 > 2,026$ ttabel menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Boyolali, karena thitung lebih ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hikmawati (2022) yang menunjukkan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Boyolali, yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Laporan keuangan yang mendukung pemerintah daerah telah digunakan oleh BKAD Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali. Sebagai ukuran akuntabilitas, laporan keuangan yang menjadi landasan pengukuran kinerja suatu instansi harus mampu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Karena pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk mengambil keputusan guna mengoptimalkan pengelolaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada uji F hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kinerja Intansi Pemerintah Boyolali. Semakin meningkat akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan secara bersama- sama akan berpnegaruhi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Boyolali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmawati (2022) yang menunjukkan hasil uji simultan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian penelitian yang dilakukan Ikrami (2021) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali. Artinya, penerapan akuntansi sektor publik (X1) tidak meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman dan implementasi akuntansi sektor publik yang efektif dikarenakan adanya faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), Pengawasan internal (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya semakin efektif pengawasan internal (X2) maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Pengawasan internal yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta memastikan bahwa kegiatan instansi pemerintah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan., Kualitas laporan keuangan (X3)berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan

ISSN: 3025-9495

tepat waktu tentang kinerja keuangan instansi pemerintah. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya menggunakan data selama 4 tahun dan variabel hanya sektor publik, laporan keuangan, instansi pemerintah. Peneliti yang akan datang disarankan untuk menambah tahun penelitian dan menambah variabel penelitian. Semakin lama penelitian berlangsung dan semakin banyak variabel penelitian, semakin jelas variasi dalam profitabilitas perusahaan di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan jurnal ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan berharga, serta kepada staf pengajar dan mahasiswa di ITB AAS Surakarta atas terciptanya lingkungan akademik yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPK), B. P. K. (1995). *Standar Audit Pemerintahan (SAP)*.
- Bastian, I. (2011). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (S. Saat & Y. Sumiharti (eds.)). Penerbit Erlangga.
- Darwanis, S. M., & Kartini. (2016). *Efect of Professionalism, Competence, Knowledge of Financial Management, and Intensity Guidance Apparatus Inspectorat for Quality of Financial Statement*.
- Fedrinawati. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Penelitian Multi Disiplin Mahasiswa*, Fedrianawati. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi.
- Fildzah. (2021). *Pengendalian Internal Untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *PARTIAL LEAST SQUARES KONSEP, TEKNIK DAN APLIKASI MENGGUNAKAN PROGRAM Smart.PLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris* (1st ed.). Yoga Pratama.
- Hikmawati. (2022). *Akuntansi Sektor Publik Untuk Mendorong Aksebilitas Masyarakat*.
- Hikmawati, E., & Rosalia. (2022). *Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Mardiasmo (ed.)). Penerbit ANDI.
- Mudrikah. (2020). *Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Nasution, D. A. D., & Br. Barus, M. D. (2019). *Audit Sektor Publik*.
- Pamungkas. (2019). *Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan, Dan Kualitas Laporan Keungan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*.
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111-112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd

ISSN: 3025-9495

ed.). ALFABETA, cv.

Tadjudinsyah, M. A. (2021). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris *Jurnal Online Mahasiswa*

<https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1669/1387>

Wulan Sari, P. (2023). *PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*. 1-13.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioloan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.